

MANAJEMEN LOGISTIK BAGI KORBAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

A.Inayah Ainun Fajriyah
NPP 31.0809

BPBD Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik
Email: nayaainuun0402@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The number of health problems that arise is evidence of one of the impacts of disaster that can reduce the quality of life of the community. After evacuation, disasters disaster has the potential to cause health problems that are actually caused by In the posts-disaster stage, the distribution of aid is a very important thing that must be carried out responsibly and effectively. distribution is a very important thing that must be carried out responsibly and with good managerial with good managerial skills by the local government to support the survival of flood-affected residents. life of the residents affected by the flood. Residents who lost their property certainly depend of course depend on this assistance from the government because conditions that are still not normal so that it has not allowed the implementation of productive community activities to support their livelihoods. productive community activities to support their respective lives. However, in the process of distributing aid there are several obstacles due to the collision of obligations between the aid provider and the recipient. obligations between the aid provider and the aid recipient. **Purpose:** Research This research aims to find out, describe, and analyze the logistics management of flood disaster victims through the Disaster. Disaster Management Agency in Bone Regency, the inhibiting factors and the efforts made to overcome these obstacles. done to overcome these obstacles. **Method:** This research uses the basic Management theory proposed by George R. Tery (1976). Management Theory Management theory has 4 (four) dimensions of implementation consisting of Planning, Organizing, Actuating and Controlling. The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach to explain the object of research based on facts. inductive approach to explain the object of research based on facts in the field. in the field. The data collection technique used is by means of interviews, observation, and documentation. **Result:** The result of the research. The results showed that the logistics management process for flood disaster victims by the BPBD in Bone Regency has been running well and in accordance with the aspects of Planning, Organizing, Actuating and Controlling. **Conclusion:** As for the factors that factors that hinder management in the form of internal problems that are not too dominant and can be overcome gradually. can be overcome gradually. The suggestions given by researchers are keep what is good and continue to improve and develop the knowledge and skills of employees in supporting the process. continue to improve and develop employee knowledge and skills in supporting the logistics management process in order to provide maximum work results.

Keywords: Logistics Management, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Flood Disaster.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Banyaknya masalah Kesehatan yang muncul merupakan bukti salah satu dampak bencana yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Pasca evakuasi, bencana berpotensi menimbulkan masalah Kesehatan yang sebenarnya disebabkan oleh masalah di daerah atau sektor lain., Pada tahap pasca bencana, penyaluran bantuan merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dengan manajerial yang baik oleh Pemerintah Daerah guna menunjang kelangsungan hidup para warga yang terdampak banjir. Warga yang kehilangan harta benda tentu saja menggantungkan hidupnya pada bantuan dari pemerintah tersebut karena kondisi yang masih belum normal sehingga belum memungkinkan terselenggaranya aktivitas masyarakat yang produktif untuk menghidupi kehidupannya masing-masing (Iskaputri et al., 2020) Namun, dalam proses penyaluran bantuan ada beberapa hambatan akibat dari terbenturnya kewajiban antara pemberi bantuan dan penerima bantuan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pengelolaan logistik terhadap korban bencana banjir bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bone, faktor penghambatnya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan dasar teori Manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry (1976). Teori Manajemen mempunyai 4 (empat) dimensi pelaksanaan yang terdiri dari *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menjelaskan objek penelitian berdasarkan fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen logistik bagi korban bencana banjir oleh BPBD di Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aspek *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*. **Kesimpulan:** Adapun faktor yang menghambat manajemen berupa masalah internal yang tidak terlalu dominan dan dapat diatasi secara bertahap. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah tetap pertahankan apa yang sudah baik dan terus meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam menunjang proses manajemen logistik agar dapat memberikan hasil kerja yang maksimal. **Kata Kunci:** Manejemen Logistik, *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, *Controlling*, Bencana Banjir.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, yang Indonesia memiliki banyak sumber daya alam dan beriklim tropis dengan hanya dua musim, musim hujan dan musim panas. Berada di daerah yang rentan terhadap berbagai kejadian alam yakni bencana geologi seperti tsunami, gunung api, gempa, longsor dan bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, pasang surut, gelombang besar dan sebagainya. Dampak dari bencana alam yang terjadi menghadirkan korban jiwa, kerugian harta dan benda, rusaknya sarana dan prasarana publik serta dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Disamping dari keadaan tersebut, waktu yang tersedia untuk bereaksi pada saat tanggap darurat bencana sangat singkat, sedangkan risiko terjadinya bencana sangat tinggi. (Suatan, 2019)

Banyaknya masalah Kesehatan yang muncul merupakan bukti salah satu dampak bencana yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat. Pasca evakuasi, bencana berpotensi

menimbulkan masalah Kesehatan yang sebenarnya disebabkan oleh masalah di daerah atau sektor lain. Dalam jangka pendek, gempa bumi, banjir, tanah longsor serta letusan gunung berapi yang akhirnya berdampak pada korban jiwa, luka berat yang perlu ditangani secara intensif, meningkatnya risiko penyakit menular, dan kerusakan fasilitas Kesehatan dan sistem penyediaan air bersih.

Banyaknya kejadian banjir di Indonesia umumnya disebabkan oleh kerusakan lingkungan, terutama menurunnya daya dukung daerah aliran sungai. Akibat dari rendahnya daya dukung aliran sungai, sehingga membuat lahan di daerah tersebut tidak mampu menahan laju aliran air yang disebabkan oleh hujan dan hal ini juga tidak dapat diimbangi dengan perbaikan kondisi lingkungan. (Andika et al., 2021). Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang memperburuk keadaan, sungai yang awal mulanya sebagai salah satu tempat penampungan air disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah disungai.

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan bantuan logistik bagi korban bencana. Secara khusus, Pasal 6 dan 8 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, yang meliputi perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan pemulihan kondisi pascabencana, termasuk pemberian bantuan logistik. Pada tahap pasca bencana, penyaluran bantuan merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dengan manajerial yang baik oleh Pemerintah Daerah guna menunjang kelangsungan hidup para warga yang terdampak banjir. Warga yang kehilangan harta benda tentu saja menggantungkan hidupnya pada bantuan dari pemerintah tersebut karena kondisi yang masih belum normal sehingga belum memungkinkan terselenggaranya aktivitas masyarakat yang produktif untuk menghidupi kehidupannya masing-masing (Iskaputri et al., 2020) Namun, dalam proses penyaluran bantuan ada beberapa hambatan akibat dari terbenturnya kewajiban antara pemberi bantuan dan penerima bantuan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penanggung jawab penyaluran bantuan seringkali terkendala masalah data yang harus divalidasi terlebih dahulu. Pasalnya, data yang dimasukkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait jumlah korban yang terkena bencana umumnya berbaur nepotisme. Berdasarkan bukti dari salah satu tim Tim Reaksi Cepat (TRC) yang disurvei oleh para peneliti, seringkali data yang masuk dari Kelurahan/Desa tempat terjadinya bencana hanya berisi data korban yang memiliki keterikatan atau kedekatan dengan Lurah atau Kepala Desa asli, dan beberapa kali data disiapkan yang bukan bagian dari komunitas. (Gunawan & Setiabudi, 2020)

Penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat yang terkena dampak bencana harus diprioritaskan bagi korban bencana yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Jangan sampai bantuan logistik hanya disalurkan kepada orang-orang yang hanya dikenal atau saudara sepupu saja, tetapi sebaiknya diutamakan korban bencana yang benar-benar terpuruk akibat bencana dan sangat membutuhkan bantuan tersebut. Agar bantuan logistik kepada korban bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel, maka disusunlah Peraturan Kepala Badan Daerah Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik. (Mabruris Sahilala et al., 2015) Pemerintah Kabupaten Bone memfokuskan tugas dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten untuk mengoptimalkan pengelolaan logistik bencana melalui prosedur yang dibuat kemudian sebagai tanggapan terhadap Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan tentang cara mengelola kebutuhan logistik dan peralatan, dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peneliti menganggap penelitian ini sangat penting karena dalam dalam proses manajemen

logistik korban bencana harus memastikan distribusi bantuan kemanusiaan dan peralatan dapat menjangkau secara cepat ke sasaran. Dengan berbagai sistem sehingga bantuan dapat disalurkan tepat waktu, kemudian pada saat pasca bencana, kesiapsiagaan, dan respon penanganan bencana, untuk dapat memastikan tujuan, tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu. Bantuan harus disalurkan secepatnya saat keadaan darurat. bantuan tidak efektif jika dibiarkan terlalu lama. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimanakah sistem manajemen bantuan logistik terhadap korban bencana banjir di Kabupaten Bone. Maka dalam hal ini peneliti tertarik menuangkannya dalam penelitian dengan judul “Manajemen Logistik bagi Korban Bencana Banjir di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2.Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat yang terkena dampak bencana harus diprioritaskan bagi korban bencana yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Jangan sampai bantuan logistik hanya disalurkan kepada kerabat atau saudara sepupu saja, tetapi sebaiknya diutamakan korban bencana yang benar-benar terpuruk akibat bencana dan sangat membutuhkan bantuan tersebut. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, bencana banjir di Kabupaten Bone terjadi sebanyak 107 kasus yang menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir usai hujan lebat disertai intensitas yang sedang hingga lebat sehingga memicu meluapnya sejumlah anak sungai. Kabupaten Bone merupakan daerah langganan banjir. Seperti yang dilansir dari idntimes.com, secara umum Kabupaten Bone sedang dalam musim hujan dengan rata-rata curah hujan dari tahun ke tahun adalah 256.08 mm per bulan dan banjir ini disebabkan curah hujan yang tinggi akibat cuaca ekstrim. (Satriawan et al., 2023)

Salah satu elemen atau unsur utama suatu aktivitas penanggulangan bencana khususnya dalam kegiatan tanggap darurat dapat berjalan dengan baik dan efektif dapat dilihat dari pelaksanaan sistem logistik bendanya. Pendistribusian bantuan logistik dalam penanganan bencana pada saat tanggap darurat selalu menghadapi permasalahan yang sangat kompleks dan beragam. Untuk itu, penyaluran logistik bencana sangat dibutuhkan karena memerlukan kurang lebih satu bulan untuk melakukan normalisasi serta rekonstruksi dan rehabilitasi dari dampak banjir ini.

Dalam proses penyaluran bantuan ada beberapa hambatan akibat dari terbenturnya kewajiban antara pemberi bantuan dan penerima bantuan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penanggung jawab penyaluran bantuan seringkali terkendala masalah data yang harus divalidasi terlebih dahulu. Pasalnya, data yang dimasukkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait jumlah korban yang terkena bencana umumnya berbau nepotisme. Berdasarkan bukti dari salah satu tim Tim Reaksi Cepat (TRC) yang disurvei oleh para peneliti, seringkali data yang masuk dari Kelurahan/Desa tempat terjadinya bencana hanya berisi data korban yang memiliki keterikatan atau kedekatan dengan Lurah atau Kepala Desa asli, dan beberapa kali data disiapkan yang bukan bagian dari komunitas. (Gunawan & Setiabudi, 2020)

1.3.Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didorong oleh hasil penelitian oleh Gerry Purwanto yang berjudul “Tata Kelola Bantuan Logistik Korban Bencana Banjir di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan” Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan tujuan untuk menemukan pola manajemen yang tepat dalam penyaluran bantuan logistik terhadap korban bencana banjir oleh BPBD Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam tata kelola bantuan logistik untuk korban bencana banjir yang

dilakukan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan. Kendala tersebut terjadi dari peran pemerintah sendiri dan masyarakat setempat dalam penanggulangan bencana banjir yang belum maksimal. Sehingga, diperlukan upaya perbaikan pelaksanaan tata kelola logistik mengacu pada penerapan teori manajemen dan teori efektivitas. Penelitian yang dilakukan oleh Gery ini mneitik beratkan pada tata manajemen logistic yang seharusnya membutuhkan Kerjasama yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat dalam distribusin.

Selanjutnya penelitian oleh Riza Yani yang berjudul “Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Tahun 2017-2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengetahui bagaimana pola manajemen yang tepat dalam penyaluran logistic yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses manajemen logistik dan peralatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang belum sepenuhnya efektif, terbukti dengan masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait kebencanaan. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Yani mendapatkan hasil dimana dalam proses distribsi bantuan masih kurang koordinasi lapangan diantara semua elemen. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah, Eko Teguh Paripurno (2021) dengan judul “Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana Banjir di Kota Kendari tahun 2017” dimana penelitian ini mendapatkan hasil penelitian yang mengarah kepada kurangnya kontribusi pemerintah dalam menangani bencana banjir, logistik yang disalurkan sangat sedikit dan tidak mencukupi, hal ini juga seperti penelitian sebelumnya yaitu tidak maksimalnya manajemen logistic yang dilaksanakan pemerintah,

Keempat Jurnal yang ditulis oleh Joharuddin dengan judul penelitian “Ketersediaan Logistik Kesehatan Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Kabupaten Nagan Raya tahun 2023” penelitian menggunakan metode kualitatif, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan logistik untuk bencana alam tidak memiliki penyimpanan yang memadai sehingga manejemen pengelolaannya tidak tertata dengan baik, terakhir Jurnal yang ditulis oleh Sotar dan Rahmadini dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik Korban Benana Pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman 2023” penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian dimana manajemen logistik masih dilakukan secara manual sehingga koordinasi yang terjadi tidak berjalan dengan lancar.

1.4.Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan peneliti terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni perbedaan lokasi yang menjadi objek penelitian, dengan demikian setiap daerah memiliki metode manajemen yang berbeda juga dalam menghadapi masalah banjir, selain itu peneliti juga menggunakan pengukuran indicator yang berbeda yakni mengukur konsep manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) berlandaskan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pemerintah Kabupaten Bone sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gery , Nazrullah dan Riza hanya menggunakan Teknik manajemen tanpa berlandaskan pada Standar Operasional Prosedur. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian penulis dengan Joharuddin dimana penelitian ini dituliskan secara mix kualitatif dan kuantitatif sehingga hasil penelitian menghasilkan pembahasan yang lebih kompleks penulis dibandingkan Joharuddin.

II.METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan peneliti secara langsung ke dalam siklus yang diteliti untuk menemukan makna yang sebenarnya. Sugiyono (2019:11) percaya bahwa penelitian kualitatif memiliki sifat holistik ketika

mempertimbangkan hubungan antara peneliti dan subjek penelitian, dan bahwa untuk lebih memahami proses penelitian, sulit untuk membedakan variabel dependen dan independen karena terdapat hubungan interaktif antar variabel penelitian yang saling mempengaruhi. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:4), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau kata-kata mengenai perilaku dan ucapan seseorang yang diamati peneliti. Sepakat dengan pandangan Yusuf (2014:337), yang berpendapat bahwa semua metode penelitian kualitatif pada umumnya bersifat deskriptif dan menggambarkan, menggambarkan, atau menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sosial masyarakat untuk mengungkap makna dalam situasi yang sebenarnya (natural setting).

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis kebutuhan logistic pada saat penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bone dan bagaimana saja manajemen logistic yang dirancang dan direalisasikan di lapangan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mulai dari perancangan, pengorganisasian, realisasi hingga kontroling. Adapun analisisnya menggunakan teori George R Tery (1978) berkaitan dengan 4 dimensi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*.

3.1. Planning

Planning disebut juga dengan perencanaan. Perencanaan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana ialah dengan memperhatikan ketepatan waktu, sasaran, jenis, kualitas, biaya, pelaporan dan jumlah barang bantuan logistik yang datang. Proses perencanaan dilakukan pada saat fase pra bencana sebagai upaya mencegah atau meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi. Fase pra bencana sudah termasuk dengan proteksi potensi bencana yang jauh-jauh hari telah dipersiapkan. Hal ini didapatkan dari peneliti berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Andi Muh Ihsan selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD pada hari Kamis 11 Januari 2024 pukul 10.06 beliau menyatakan bahwa :

“Setiap langkah perencanaan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk mengatasi bencana banjir telah berhasil kami terapkan. Seperti pemasangan rambu peringatan banjir, persiapan logistik hingga transportasinya ke lokasi terdampak, dan manajemen dana untuk kebutuhan telah dirancang dan dilaksanakan. Upaya-upaya yang telah pemerintah kabupaten Bone lakukan tidak dapat melakukan Tindakan preventif seperti mencegah banjir di Kabupaten Bone, tetapi hanya dapat mengurangi dampak dari banjir.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, peneliti memperoleh informasi bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar, seperti masih kurang pedulinya masyarakat dalam memperhatikan sampah sehingga aliran air tidak berjalan dengan baik, akibatnya pemerintah hanya terus mengupayakan untuk melakukan Langkah-langkah dalam mengurangi dampak banjir, seperti realisasi logistic bagi lokasi terdampak kemudian pembenahan rumah-rumah warga yang terdampak banjir dalam kategori yang cukup parah hingga proses penyusunan anggaran diperhatikan dengan sebaik mungkin oleh Pemerinrah Kabupaten Bone dalam hal ini Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun demikian, pemerintah Kabupaten Bone telah melakukan tindakan tambahan untuk mengatasi bencana banjir, termasuk membangun jalur evakuasi. Jalur evakuasi merupakan sarana dan prasarana yang penting sebagai antisipasi penyelamatan penyelamatan diri, harta dan benda apabila terjadi bencana banjir di Kabupaten Bone. Sejalan dengan pernyataan Plt.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bone, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada. Namun, peneliti merasa bahwa bertanya kepada satu sumber saja tidak cukup; oleh karena itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan orang lain yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Berkaitan dengan itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bone Bapak Sutardi Hadisaputra, S.E pada hari Senin 11 Januari 2024 di ruangannya. Beliau pun mengatakan :

“Kalau untuk perencanaannya memang kita selalu melakukan koordinasi kepada Kepala Pelaksana BPBD agar kedepannya jika ada masalah bisa diselesaikan dan dipertanggungjawabkan, tidak saling menyalahkan apabila terjadi kesalahan. Biasanya dalam menentukan rencana selanjutnya, kita belajar dari pengalaman dan kesalahan terdahulu sehingga perencanaan yang dibuat tidak menimbulkan masalah yang sama.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa adanya proses penyesuaian yang dilakukan oleh BPBD bersama Pemerintah Kabupaten Bone berupa sebuah koordinasi antara pimpinan dan pegawai dalam menyusun langkah-langkah dan persiapan yang akan disiapkan sebelum melakukan penyaluran bantuan ke lokasi tujuan sehingga peneliti menilai sudah sangat baik.

3.2. Organizing

Pengorganisasian yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana merupakan bentuk lain dari kerjasama untuk mengurangi atau meminimalisir dampak yang terjadi akibat bencana secara bergotong-royong. Dalam wadah organisasi yang baik maka upaya penanggulangan bencana akan lebih terasa manfaatnya dari pada perseorangan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bone adalah membentuk jalur koordinasi langsung dengan setiap kepala desa yang terdampak banjir. dimana di setiap wilayah membentuk organisasi mandiri yang mendukung program penanggulangan bencana. Organisasi-organisasi ini diikuti oleh warga muda dan lanjut usia untuk membantu pemerintah dalam menangan bencana, seperti banjir di Kabupaten Bone. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu Kepala Desa Awangpone pada tanggal 11 Januari 2024 saat di wawancarai terakait proses pembentukan jalur koordinasi tersebut :

“Pembangunan jalur koordinasi ini sangat membantu ya kami tentunya karena pemerintah langsung bisa menjangkau kami yang terdampak dan kami dapat melaporkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan secara aktual, tentunya saya juga berkomunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, karena merekalah yang nantinya langsung mengesekusi bantuan dari Pak Bupati, dalam hal ini saya juga bisa melibatkan anak-anak muda desa dan beberapa masyarakat untuk mempermudah proses penyaluran bantuan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di deskripsikan bahwa Pembangunan jalur koordinasi untuk mempermudah pengaturan realisasi bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah desa sangatlah terorganisir dan teratur karena Bupati bersama dengan BPBD langsung menjangkau komunikasi dengan para kepala desa yang desanya terdampak, hal ini tentu sangat mempermudah proses penyerapan informasi di lapangan secara aktual.

3.3. Actuating

Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bone mendapat perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone karena terdapat beberapa Kecamatan yang menjadi daerah yang rawan terjadi banjir. Bentuk perhatian khusus dari Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone sebagaimana

dikemukakan oleh Andi Muh Ihsan selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD pada hari Kamis 11 Januari 2024, beliau menyatakan bahwa:

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone sangat pro aktif dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik itu saat pra bencana, tanggap darurat bencana, serta pada saat pasca bencana di seluruh daerah di Kabupaten Bone. Bentuk perhatian dari BPBD Kabupaten Bone terhadap penanggulangan bencana banjir adalah untuk sektor pra bencana dengan memasang Early Warning System (EWS). Selain itu juga membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana). Aksi pada saat tanggap darurat bencana adalah dengan turun langsung ke lokasi bencana, melakukan evakuasi

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone telah melakukan berbagai upaya untuk menangani bencana banjir di Kabupaten Bone, mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mengurangi tingkat banjir dan efeknya. Selain upaya penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone, BPBD juga meningkatkan kualitas tindakan penanggulangan bencana banjir dengan memberikan pelatihan dasar tanggap bencana kepada anggota kelompok organisasi Desa Tangguh Bencana (Destana). Desa Tangguh Bencana ditugaskan untuk mendorong masyarakat untuk menerapkan program penanggulangan bencana dan melakukan pengawasan dan koordinasi secara teratur. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bone tidak terlepas dari barang bantuan logistik. Sumber daya barang bantuan logistik yang ditujukan untuk penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bone berasal dari dana pemerintah Kabupaten Bone, bantuan dari organisasi kemanusiaan dan donatur. Penyaluran barang bantuan logistik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone berpedoman pada asas cepat, tepat, merata dan adil. Namun, berbeda dengan ungkapan masyarakat yang menjadi korban bencana banjir di Kecamatan Awangpone yaitu Ibu Cia pada hari Sabtu, 13 Januari 2024 menuturkan bahwa:

“Penyaluran bantuan yang dilakukan masih kurang maksimal, hal ini karena ada warga desa yang mendapatkan bantuan double dan ada juga warga desa di Kecamatan Awangpone yang tidak mendapatkan bantuan dikarenakan akses untuk masuk tidak mendukung, sehingga kedepannya BPBD dapat memperhatikan kembali masalah-masalah ini agar tidak terjadi kembali.”

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat lain yang menjadi sasaran penyaluran logistik bencana yaitu bapak Hamza di Kecamatan Sibulue pada hari Minggu, 14 Januari 2024. Beliau menyampaikan bahwa:

“Penyaluran bantuan yang dilakukan BPBD Kabupaten Bone sudah merata dapat dilihat bahwa jumlah kebutuhan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan sehingga bisa terpenuhi. Kemudian dalam pelaksanaan penerimaan akan dibuatkan juga sebuah berita acara serah terima sehingga dapat dijadikan bukti bahwa penyaluran atau pemberian bantuan terhadap korban bencana

Berdasarkan dari dua pernyataan tersebut, adanya dua pendapat yang berbeda membuktikan bahwa perlunya evaluasi kembali terhadap pendistribusian yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bone, yang kemudian peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Bone terkadang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Sehingga peneliti menilai bahwa pendistribusian logistik oleh BPBD kurang maksimal.

3.4. Controlling

Controlling disebut juga dengan pengawasan, yang dalam aspek tanggap terhadap bencana pengawasan dilakukan dengan mengawasi secara detail proses penanganan bencana agar pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana banjir ke lokasi terdampak. Pemerintah Kabupaten Bone memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana banjir yang harus diikuti oleh seluruh penduduk Kabupaten Bone yang dimana untuk mencegah bencana banjir, pertama kesiapsiagaan menghadapi bencana, seperti memberi tanda peringatan bahaya kepada warga, SOP evakuasi dan penyelamatan hingga SOP Distribusi Logistik saat Tanggap Darurat Bencana. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

“Pemerintah Kabupaten sudah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanggulangan bencana banjir secara jelas dan sudah kami perhitungkan mengenai setiap tindakan yang harus dilakukan. Setiap status atau level bencana banjir yang terjadi tentu saja perlu melakukan penanggulangan bencana yang berbeda-beda dan harus dilaksanakan. Namun,

BPBD Kabupaten Bone Bapak Sutardi Hadisaputra, S.E pada wawancara hari Senin, 15 Januari 2024, beliau menyatakan bahwa:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa terdapat kendala yang berasal dari masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan atau Standar Operasional Prosedur penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bone, menurut pengamatan peneliti hal tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melakukan setiap tindakan-tindakan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan salah satunya adalah melakukan evakuasi dengan cara mengungsi terutama evakuasi diri pribadi dan sanak keluarga. Sehingga, diperlukan edukasi dan pengawasan dari pemerintah agar masyarakat dapat patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

3.5. Hambatan

Adapun beberapa hambatan yang dialami BPBD Kabupaten Bone dalam melakukan sebuah manajemen logistik bencana

1. Anggaran

Dalam hal anggaran setiap tahun anggaran yang diperoleh oleh pihak BPBD mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena efek resesi sehingga menyebabkan beberapa masalah berupa kurang mencukupinya barang logistik. Sehingga peneliti menganggap masalah anggaran sudah hal yang wajar dalam pelaksanaan kegiatan besar.

2. Sumber Daya Manusia

Kurangnya kecapakan pegawai BPBD Kabupaten Bone terhadap hal-hal administratif menyebabkan besarnya dampak yang diakibatkan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Untuk mendapatkan manfaat yang besar dari pelaksanaan manajemen logistik bencana korban banjir, hendaknya disertai dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Apabila sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendistribusian barang logistik tidak sesuai dengan kapasitas target capaian yang diharapkan maka tidak akan berjalan secara maksimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Bone belum cukup memadai terutama sektor akomodasi dan gudang penyimpanan.

3.6. Upaya atau Solusi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone memperhatikan masalah yang terjadi dalam menjalankan manajemen logistik untuk korban bencana banjir. Sebab, jika hambatan dibiarkan, hal itu dapat menyebabkan dampak bencana yang lebih besar dan mengganggu program penanggulangan bencana Kabupaten Bone. Bentuk perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone dari adanya Salah satu masalah yang dihadapi korban bencana banjir di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan Manajemen Logistik Bencana secara rutin

Pelaksanaan manajemen logistik sebagai upaya penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bone dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Untuk membuktikan bahwa pelaksanaan manajemen logistik bencana banjir tersebut diterapkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada, Untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan/desa secara berjenjang. Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen logistik bencana antara lain adalah pengawasan kearsipan pelaksanaan manajemen logistik bencana, pengawasan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, monitoring alur bantuan logistik, dan lain sebagainya.

2. Penataan Sarana dan Prasarana Lebih Baik

Dalam upaya memberikan bantuan logistik kepada korban banjir di Kabupaten Bone, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana Optimalisasi sarana dan prasarana manajemen logistik bencana diantaranya peningkatan prasarana gudang logistik dengan mengefisienkan penyusunan bahan logistik dengan memanfaatkan sarana yang tersedia seperti memaksimalkan penyusunan letak bantuan logistik pada rak sehingga kapasitas dari rak tersebut bisa maksimal.

3.7. Diskusi dan Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Manajemen Logistik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone memberikan banyak dampak positif meskipun tidak sepenuhnya mampu mengatasi atau mencegah banjir, namun manajemen logistik yang dilakukan cukup melibatkan banyak partisipasi berbagai elemen pemerintah dan masyarakat. Penulis menemukan temuan penting yakni pemuda-pemuda di daerah terdampak banjir ikut berpartisipasi melaksanakan realisasi bantuan pemerintah di lapangan dengan bekerja sama dengan generasi tua yang ada di lokasi, hal ini berbeda dengan program manajemen yang dilakukan oleh Gerry di Kota Kendari dimana kurangnya bantuan logistik dan berakibat pada rendahnya partisipasi dari berbagai kalangan terutama anak muda.

Layaknya manajemen logistik hasil penelitian Rizki Yura alokasi bantuan logistik terealisasi dengan baik karena jalinan komunikasi yang cukup antara semua pihak, serta dorongan motivasi imbalan yang diberikan pemerintah yang membuat program dapat berjalan dengan baik. Komunikasi menjadi bagian utama dalam partisipasi penyelenggaraan manajemen logistik di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti pada fokus penelitian tentang manajemen logistik korban bencana banjir di Kabupaten Bone dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen logistik bencana BPBD Kabupaten Bone masih belum optimal karena ada

beberapa aspek yang belum dilaksanakan dengan baik.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan manajemen logistik bencana oleh BPBD Kabupaten Bone termasuk anggaran, sumber daya manusia, dan kekurangan prasarana dan alat. Upaya yang diambil BPBD Kabupaten Bone untuk mengatasi kendala manajemen logistik bencana bagi korban bencana banjir termasuk pengawasan rutin manajemen logistik bencana dan peningkatan tata letak sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian yang peneliti bahas diatas, untuk menciptakan kualitas manajemen logistik bencana oleh BPBD Kabupaten Bone Peneliti memberikan saran antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan terhadap implementasi sistem manajemen logistik untuk penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bone oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone dengan tujuan meningkatkan kompetensi dalam hal pengetahuan tentang risiko bencana serta pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan, serta peningkatan keterampilan kebencanaan berupa keterampilan kerja tim, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan manajemen waktu kepada pegawai-pegawai kantor. Sehingga kedepannya diharapkan menghasilkan pegawai-pegawai yang handal dan berkompentensi pada bidangnya masing-masing.
2. Diperlukan perhatian yang besar dari aparaturnya agar dapat bekerjasama dalam pelaksanaan manajemen logistik bencana mulai perencanaan sampai dengan pemberian logistik kepada korban bencana banjir. Pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik akan menciptakan kerjasama yang baik sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. Koordinasi ke pemerintah setempat yang terdampak bencana banjir akan lebih memudahkan proses manajemen logistik yang akan dilaksanakan sehingga lebih efektif dan efisien.
3. Perlunya renovasi dan pembangunan gudang penyimpanan logistik yang baru karena dapat membantu memastikan ketersediaan bantuan logistik dan memudahkan distribusinya ke daerah-daerah terdampak secara efisien dan efektif. Pergudangan dapat membantu dalam meminimalkan risiko dan biaya penyimpanan dan distribusi bantuan logistik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas manajemen logistik bencana secara keseluruhan.

Keterbatasan Penilitin, Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu keluarahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian, Penulis menyadari awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi-lokasi terdampak banjir lainnya yang memiliki program manajemen logistic lebih terpadu, sistematis dan terstruktur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone dan segenap Pemerintah Kabupaten Bone serta masyarakat terdampak banjir di lokasi yang telah berkenaan dimintai keterangannya untuk dideskripsikan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat sukses dirampungkan.

VI.DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Azhar. 2002. *Media Pembelajaran, edisi 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2019. *Buku Saku Tangap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Jakarta: Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Bogdan dan Taylor. 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Garside, Annisa Kesy dan Dewi Rahmasari. 2017. *Manajemen Logistik*. Malang: UMM Press
- Amalia, Jihan Oktaviani. Putri, T. A. (2019). Jurnal pasopati. *Jurnal Pasopati*, 1(2), 28–33.
- Gunawan, E. O., & Setiabudi, D. H. (2020). Perangkat Lunak Logistik Kemanusiaan untuk Memantau Distribusi Bantuan Korban Bencana Alam. *Jurnal Infra*, 8(10), 1–5. <http://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-informatika/article/view/9871>
- Iskaputri, A., Razak, A., & Arifin, M. A. (2020). Manajemen Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Hasanuddin Journal of Public Health*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.30597/hjph.v1i1.9511>
- Mabruris Sahilala, I., Sarwono, & Hanafi, I. (2015). Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam (Studi Empiris pada Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro). *Jap*, 3(5), 813.
- Nasrullah, Paripurno, E. T., & Prasetyo, J. D. (2021). Pengelolaan bantuan logistik bencana banjir : studi kasus tanggap darurat bencana di kota kendari tahun 2017. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 25–38.
- Purwanto, G. (2020). Tata Kelola Bantuan Logistik Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. *Jurnal MoZaiK*, 12(2), 72–84.
- Satriawan, A. P., Mansur, S., & Ambo, N. (2023). *Volume 6 Issue 8 AGUSTUS 2023 Pengelolaan Logistik dalam Upaya Penanganan Pasca Bencana Alam Gempa Bumi , Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu Logistik Management in Efforts to Handle Post Earthquake Natural Disasters , Tsunamis and Liquefaction in the Ci*. 6(8), 1068–1077. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i8.4020>
- Suatan, R. A. (2019). *Peranan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam Di Kabupaten Minahasa*. 1–15.
- Sukardi, N. I., Canra, D., Konoras, A., & Ridho, M. (2020). Sistem Manajemen Dan Distribusi Logistik Kebencanaan Studi Kasus Untuk Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Halmahera Selatan. *Journal of Science and Engineering* , 01, 33–37.
- Wijanarko, R. (2022). Efektivitas Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penyaluran Bantuan Logistik Pada Korban Bencana Banjir Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Iskaputri, Annisa, Amran Raazak, dan Muh. Alwy Arifin. 2020. “Manajemen Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 1 (1). 41-50
- Mustanir, Ahmad, dkk. 2018. “Potrait of Earth Slices in Tonrong Rijang Village in Transect

on Participatory Development Planning". Jurnal Moderat. Vol. 4 (4), 1-14

Nasrullah, Eko Teguh Paripurno, dan Johan Danu Prasetyo. 2021. "*Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana Banjir: Studi Kasus Tanggap Darurat Bencana di Kota Kendari Tahun 2017*". Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora. Vol. 2.07, 1-14

Riza, Yani. 2019. "*Manajemen Logistik Dan Peralatan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Tahun 2017- 2018*". Diploma tesis, Universitas Andalas.

Sari, Winda. 2012. "*Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan*". Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan, Vol. 1 No. 1

Utami, Novelia, dan Onny Fitriana Sitorus. 2015. "*Manajemen Logistik di Giant Ekstra*". Jurnal Utilitas, Vol. 1 No.1, 92-102

Winda, Sari. 2012. "*Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Perpustakaan*". Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan, Vol. 1 No. 1, 14

